

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- B. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: FH-UNDIP, 1989.
- Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008.
- Fred B.G. Tumbuan, *Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, Materi Pendidikan Smgkat Hukum Bisnis*, Jakarta: Unika Atmajaya, 2000.
- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1982.
- Henry Chambell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Mimi: West Publishing Co., 1991.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Cetakan kesatu, Jakarta: Tatanusa, 2008.

- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoint, 1996.
- Janet Dine, *Company Law*, London: Sweet & Maxweel, 1998.
- K. Wantjik Sakh, *Pelengkap KUHP*, Jakarta: Ghalja Indonesia, 1982.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan oleh Organisasi Suatu Tinjauan Dari Segi Kriminologi*, Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding; Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Paul R. Niven. *Balanced Scorecard step by step: Maximizing Performance and Maintaining Results*, New Jersey: John Wiley & Sons. Inc., 2006.
- Pennington Robert R., *Company Law, Fifth Edition*, London: Butterworth, 1985.
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, BPHN, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan Kembali dan Grasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Puslitbang Kejakung RI, 2006.

Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas Bank dan Persero*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nindyo Pramono, 2001, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hkum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

System Integrator Agreement, PT. Siemens Indonesia-PT. Dwiraya Mitra Indonesia 2010.

Surat Perjanjian penyelesaian utang PT. Siemens Indonesia-PT. Dwiraya Mitra Engineering.